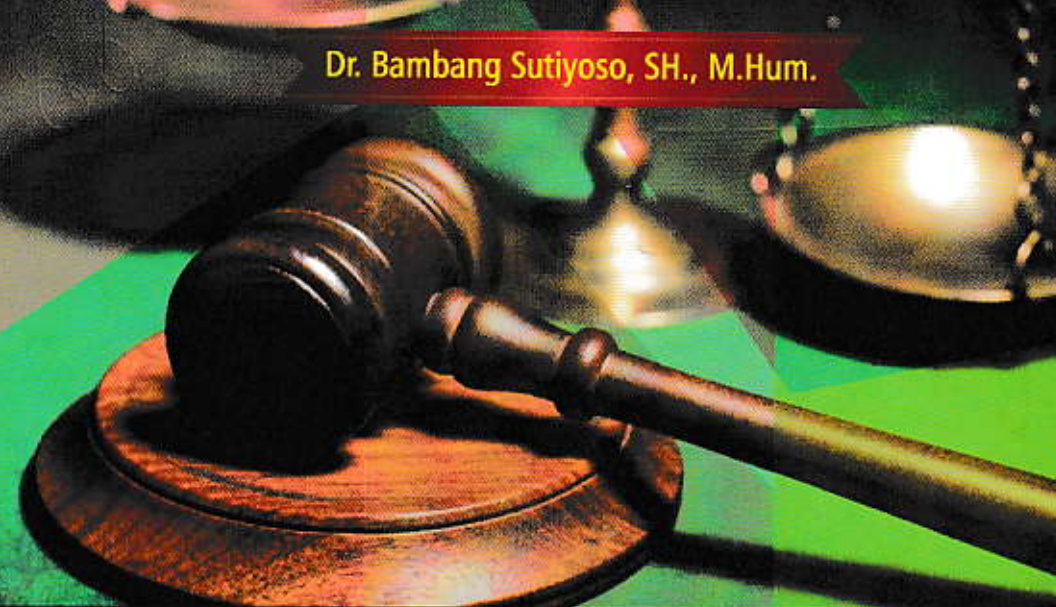


Dr. Bambang Sutyoso, SH., M.Hum.



METODE PENEMUAN HUKUM

Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan

edisi revisi



UIN Press



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SEKAPUR SIRIH	v
PENGANTAR BUKU CETAKAN KEEMPAT	ix
KATA PENGANTAR : PROF. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. .	xi
DAFTAR ISI	xiii
 BAB I HUKUM DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN	 1
A. Hukum dan Kekuasaan Kehakiman.....	2
B. Hakim dan Penegakkan Keadilan Tugas dan kewajiban Hakim	6
C. Penguatan Peran Komisi Yudisial di Indonesia	17
D. Penguatan Peran Komisi Yudisial di Indonesia	21
 BAB II DASAR-DASAR DAN PENGERTIAN	
PENEMUAN HUKUM	41
A. Sasaran studi ilmu hukum	42
B. Pemecahan Masalah Hukum.....	47
c. Pengertian dan peristilahan dalam penemuan hukum.....	48

D. Sebab-sebab dan dasar penemuan hukum	52
BAB III SISTEM, SUBYEK DAN SUMBER PENEMUAN HUKUM.....	59
A. Sistem Penemuan hukum.....	60
B. Subyek atau pelaku penemuan hukum	63
C. Sumber penemuan hukum	64
BAB IV ALIRAN-ALIRAN DALAM PENEMUAN HUKUM	73
A. Timbulnya aliran penemuan hukum.....	74
B. Beberapa aliran penemuan hukum.....	74
BAB V METODE PENEMUAN HUKUM dan PENGGUNAAN BAHASA HUKUM.....	99
A. Urgensi metode penemuan hukum	100
B. Beberapa metode penemuan hukum	101
1. Metode Interpretasi (Penafsiran).....	104
2. Metode argumentasi (penalaran)	130
3. Metode Eksposisi (Konstruksi hukum).....	141
4. Metode Penemuan Hukum Islam	149
C. Tolok Ukur/Pedoman Penggunaan Penemuan Hukum....	160
D. Penggunaan Bahasa Hukum Indonesia	166
BAB VI PROSEDUR DAN PRAKTEK PENEMUAN HUKUM...	175
A. Tahapan Dalam hukum Acara.....	176
B. Prosedur penemuan hukum.....	178
C. Praktik penemuan hukum dalam peradilan.....	185
D. <i>Onrechtmatiggedaad</i> dan Perkembangannya	188
DAFTAR PUSTAKA	195
INDEKS	201
LAMPIRAN.....	205
1. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung	206

2. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman	234
3. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-undang Peradilan Umum	268
4. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Peradilan Agama	296
5. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara	328
6. Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial	362